

**PERAN PEMERINTAH DESA MELALUI ANGGARAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2020
DI DESA TELUK KECAMATAN SECANGGANG
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

Rara Indah Sari

NIM: 0103173044

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PERAN PEMERINTAH DESA MELALUI ANGGARAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2020
DI DESA TELUK KECAMATAN SECANGGANG
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

Rara Indah Sari
NIM: 0103173044

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I



Dr. Darwin Zainuddin, MA

Nip: 195912311998031010

Pembimbing II



Dr. Salamuddin, MA

Nip: 197407192007011014

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Hal : Skripsi
An. Rara Indah Sari

Medan, 7 Juli 2021
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sumatra Utara
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Rara Indah Sari yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Melalui Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Darwin Zainuddin, MA

Dr. Salamuddin, MA

Nip: 195912311998031010

Nip: 197407192007011014

ABSTRAK

Nama : Rara Indah Sari
NIM : 0103173044
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Pembimbing I : Dr. Darwin Zainudin, MA
Pembimbing II : Dr. Salamuddin, MA
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Desa Melalui Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 Di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama masyarakat yang lemahnya dalam berpartisipasi dan kelompok yang terabaikan bisa kita ketahui dari tabel yang sudah saya lampirkan di hasil penelitian.

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam menginterpretasikan data tentang variable dan metode yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah mengetahui Program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat di tahun 2020 melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Faktor pendukung dan faktor penghambat diantaranya yaitu dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan ADD di wilayah Desa Teluk sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peran Pemerintah Desa Melalui Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 Di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat''. Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir semester dalam rangka mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada Baginda Nabi agung Muhammad SAW sehingga kelak kita semua termasuk kedalam kaum yang mendapatkan Syafa'atnya di *yaumulakhir*.

Penulis skripsi ini adalah tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos), Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis, maka akan dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun segi ilmiah. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari semua pihak yang telah banyak berperan serta dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan tercinta kepada kedua orang tua saya: Ayahanda Jainal Rajuddin dan Ibunda Nila Watiyang tidak pernah putus asa memberikan bantuan moral dan materi, pengorbanan serta dukungan yang sangat besar terhadap saya. Terimakasih untuk segala yang telah Ayah dan Ibuterikan.
2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri SumateraUtara.
3. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bapak Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Darwin Zainuddin, MA dan Bapak Dr. Salamuddin, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengkritis dan mengarahkan pembuatan skripsiini.
5. Terimakasih kepada Bapak Maulana Andi Surya, Lc, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, serta nasehat-nasehatnya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsiini.
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Annaisaburi Nasution, MA selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Sekjur Bapak Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA, dan staff jurusan Ibu Atikah Asna, M.Psi serta seluruh dosen PMI yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmunya.

7. Terimakasih kepada Pemerintah Desa Ibu Sutinah dan Staf- Stafnya beserta masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat melalui *Anggaran Dana Desa* atas bantuan dan bimbingannya sampai penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih untuk rekan saya yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung saya agar semangat dalam mengerjakan Skripsi ini yaitu Bayu Firdaus Nasution dan sahabat-sahabat saya (Intan, melisa, yuni, elfi, ariana, andini, stefany, ulfa, syifa, roby, dedi dan buat teman-teman seperjuangan di PMI A angkatan 17 serta adik-adik di sekitaran jurusan PMI fakultas Dakwah dan Komunikasi) yang berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu dan senantiasa ceria dan tidak pernah henti menyemangati penulis.
9. Terimakasih kepada Keluarga Besar Mbok Rojiah terkhusus tante Nunung yang selalu mendoakan saya dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada kakak-kakak senior dan juga terimakasih kepada teman-teman dan keluarga besar HMJ PMI. Yang selalu menyemangati penulis.

Semoga amal dan jasa baik yang diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama

dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita.Aaamiin.

Medan, 06 Juli 2021

Penulis

Rara Indah Sari
NIM: 0103173044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
LANDASAN TEORETIS.....	10
A. Pemberdayaan Masyarakat.....	10
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	10
2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	15
3. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	17
A. Dana Desa.....	21
1. Pengertian Dana Desa	21
2. Sasaran dan Tujuan Dana Desa	23
3. Penganggaran Dana Desa.....	25
4. Anggaran Desa	29
B. Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa.....	30
1. Prinsip Penggunaan	30
2. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa	31
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa	32
C. Kajian Terdahulu	33
BAB IIIMETODE PENELITIAN.....	36

A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Populasi dan Sampel	36
C. Jenis Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Sumber Data	41
F. Informan Penelitian	41
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Desa Teluk.....	45
1. Sejarah Singkat Desa Teluk	45
2. Pemimpin Desa	46
3. Struktur Kepengurusan Desa Teluk	47
4. Demografis Desa Teluk	50
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat	54
1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	56
2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	60
3. Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa	63
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Anggaran Dana Desa	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
PEDOMAN WAWANCARA	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur di desa, seperti sarana pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi dan komunikasi harus dapat disediakan sehingga memungkinkan desa menjadi berkembang dan maju. Prioritas pembangunan berbasis pedesaan meliputi: (1) pengembangan kapasitas dan pendampingan apatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah secara berkelanjutan, (2) pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan geografisnya, (3) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, (4) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa, (5) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, (6) pengembangan ekonomi pengawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, (7) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi dan pendampingan. Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat membuat kebijakan dana desa.¹

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, dana yang bersumber dari APBN, yang ditrasnfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk

¹Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), hlm.1.

memadai kegiatan pembangunan desa. Pemerintah Desa dan kemasyarakatan.² Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016. Dana desa dialokasikan ke 74,093 desa yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Desa di Wilayah Republik Indonesia

NO	Klirifikasi Desa	Jumlah Desa
1	Desa Tertinggal	20,167
2	Desa Berkembang	51,002
3	Desa Mandiri	2, 904
	Total	74,093

Sumber : Kemendes.go.id

Sebaran desa tertinggal di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Papua dengan jumlah 6.139 desa (8,29%), sedangkan sebaran desa berkembang dan mandiri paling banyak terdapat di Paulau Jawa-Bali dengan 20.827 desa berkembang (28,11%) dan 2.253 desa Mandiri (3,04%).

Berdasarkan ketentuan ini desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kondisi demikian, Pemerintah Daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Disisi lain birokrasi daerah juga harus mereformasi diri dari pemerintah yang korup menjadi bersih, transparan dan akuntabel.

Kondisi miskin yang terjadi di Indonesia telah berdampak ke masyarakat dengan semakin meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan harus menggunakan pendekatan yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Dan juga didasari oleh usaha yang maksimal dari potensi yang dimiliki masyarakat tersebut agar mampu mencapai kesejahteraan.

Dan upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan, dengan memulai program pembangunan daerah. Pemerintah juga memiliki program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Karena sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Ra'd: 11)

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”³

Selama ini, pembangunan masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*).

Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung atau pun memelihara program tersebut.

Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari Pemerintah Kabupaten.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Sabiq, 2009), hlm. 250.

Dana desa (ADD) ini dimaksud untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung mau pun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakat, sangatlah spesifik dan tidak dapat disama ratakan untuk semua desa.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Anggaran Dana Desa di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Peran diartikan sebagai pemain, yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

⁴<https://www.kbbi.web.id/peran>, diakses pada 20 Februari 2020 Pukul 12:45 WIB.

2. Pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.⁵Pemberdayaan menurut R.J. Parsons, J.D. Jorgensen, dan S.H. Hernandes pemberdayaan menunjuk suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan memengaruhi terhadap kejadian-kejadian dan lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menuntun orang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁶Dalam pemberdayaan yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah pemberdayaan agar masyarakat bisa mengetahui program Pemerintah Desa yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui anggaran dana desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat desa dapat memelihara program tersebut yang dapat mengembangkan potensi mereka.
3. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

⁵Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, hlm. 74-75.

⁶Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 241-242.

pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dana desa dalam penelitian ini adalah dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan desa.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi program Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Dana Desa di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Dana Desa di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan berguna:

1. Bagi penulis penulis dapat mengerti manfaat program yang dibuat oleh Pemerintah melalui dana desa untuk pembangunan desa.
2. Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa khususnya dalam program Pemerintah Desa melalui dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.

3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi masyarakat untuk mendorong masyarakat untuk lebih memelihara dan memperhartikan program yang telah di bentuk oleh Pemerintah Desa.

F. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan teoretis terdiri dari Pengertian Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pemberdayaan, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Islam, Pengertian Dana Desa, Teori Penganggaran Dana Desa: Manfaat Anggaran, Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa, Kajian terdahulu.

Bab III: Metode penelitian terdiri dari Lokasi Penelitian, Populasi atau Sample, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian terdiri dari sejarah singkat Desa Teluk, struktur kepengurusan Desa Teluk, demografis Desa Teluk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam program anggaran dana desa.

Bab V: Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang membangun objek penelitian agar lebih baik lagi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal henti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktek, perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian dimaksud terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu-hidup masyarakat beserta individu-individu didalamnya dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁷

⁷Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 24.

Menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia) pemberdayaan berkarakter dari kata daya, bermakna. (1) Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. (2) Kekuatan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya). (3) Muslihat, akal, ikhtiar, upaya. Pemberdayaan diartikan proses, cara, perbuatan memberdayakan. Adapun makna pemberdayaan menurut para ahli diantaranya adalah C.Swift dan G. Levin: Pemberdayaan merupakan suatu usaha pengembalian kekuasaan melalui perubahan struktur sosial dan menurut Eddy Palilaya yang dikutip oleh Zubaedi bahwa pembangunan kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁸

Adapun makna pemberdayaan menurut para ahli memiliki beragam pengertian dan arti, di antaranya menurut:

- a. J. Ife: pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau kurang beruntung.
- b. J. Rappaport: pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana orang, organisasi, dan komunitas diarahkan supaya mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.⁹
- c. Gutierrez: pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, antarpribadi, atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga,

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2017), hlm. 58.

⁹Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi*, hlm. 242-243.

dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi-situasi mereka.

Pemberdayaan itu sendiri juga termasuk yang sangat membawa manfaat untuk orang banyak terutama masyarakat karna bisa membawa perubahan terhadap ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁰

Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin di capai dalam setiap pembangunan adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu “eco development” yang tidak hanya berupa perubahan-perubahan ekonomi. Pembangunan juga mencakup “*dehumanisasi*” cultural dan perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu struktur sosial dan politik tertentu. Dengan demikian pembangunan bukanlah semata-mata bersifat ekonomi yang berupa kenaikan pendapatan, pertumbuhan dan pemerataan serta hal-hal yang lain dapat diukur dengan indikator-indikator ekonomi, melainkan juga banyak mencakup banyak aspek non-materil seperti: penentuan nasib sendiri, swadaya, kemerdekaan dan pengayoman politik, partisipasi, identitas kltural, kepribadian nasional.¹¹

¹⁰Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 81.

Berkaitan dengan hal tersebut, esensi setiap kegiatan pembangunan adalah terjadinya perubahan sikap untuk memproyeksi diri ke dalam situasi lain dan arena itu secara sadar dan terencana menyiapkan diri untuk melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki mutu hidupnya, guna mengantisipasi keadaan dan perubahan-perubahan yang akan terjadi dimasa mendatang.¹²

Selaras dengan pengertian-pengertian diatas, maka secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang atau akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.¹³

Sedangkan masyarakat diartikan sebagai kelompok warga yang terdapat di sebuah desa, kota dengan suku atau bangsa tertentu. Pada hakekatnya, masyarakat mulai terbentuk ketika sekumpulan orang dalam jumlah kecil atau besar hidup bersama memenuhi ragam kebutuhan disuatu wilayah dengan batas geografis yang jelas kebutuhan dasar.¹⁴

¹¹Ully Hikmah Andini, dkk, *Pemberdayaan Ekonomi*, hlm. 8-9.

¹² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bndung : Alfabeta), hlm, 3.

¹³*Ibid*,...Hlm....,5.

¹⁴Ully Hikmah Andini, dkk, *Pemberdayaan Ekonomi*, hlm. 11-12.

Pemerintah harus membuat program-program yang dimana program tersebut dalam membangun masyarakatnya dan program tersebut dalam memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Adapun perencanaan yang melatarbelakangi program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan harus melakukan analisis terlebih dahulu agar dapat mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kebutuhan harus dapat benar-benar dapat memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya kebutuhan beberapa orang baik tokoh masyarakat maupun Kepala Desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan.

Pembangunan masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat yang dimana masyarakat harus memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip.

- a. Transpasansi (keterbukaan)
- b. Partisipasi
- c. Dapat dinikmati masyarakat
- d. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas)
- e. Berkelanjutan (sustainable)

Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan masyarakat dan juga komitmen pemerintah dalam memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan suatu program yang bernama Anggaran Dana Desa. Alokasi tersebut

diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathews menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- a. *Mengerjakan* artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilan) yang akan terus diingat untuk jangka waktu lebih lama.
- b. *Akibat* artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar pemberdayaan di masa yang akan datang.
- c. *Asosiasi* artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau

menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa lainnya. Misalnya dengan melihat cangkul orang diingkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik

Lebih lanjut, Dahama mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lainnya mencakup:

- a. Minat dan kebutuhan artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini harus dikaji secara mendalam apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap masyarakat.
- b. Organisasi masyarakat bawah artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah.
- c. Keragaman budaya artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam .
- d. Perubahan budaya artinya setiap kegiatan pemberdayaan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan budaya baru.
- e. Kerjasama dan partisipasi artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama

dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.

- f. Demokrasi dalam penerapan ilmu artinya dalam pemberdayaan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi disini bukan terbatas pada tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metode pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasaran.¹⁵

3. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Kartasmita menegaskan bahwa seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas.¹⁶Terkait dengan kajian tentang pembangunan. Muhi juga mengemukakan beberapa pendekatan teoritis sebagai berikut:

- a. Teori Evaluasi, yang mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menyebutnya bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana kearah yang semakin kompleks, sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografis, rasial, teknologi maupun ideology.

¹⁵Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bndung : Alfabeta), hlm, 107.

¹⁶Kartasmita, *Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*,(Surabaya: DPD Golkar), hlm.67.

- b. Jimmu menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori bagaimana cara mengembangkan daerah pedesaan akan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan ditingkat masyarakat.
- c. Terori Struktural Fungsional dari parsons yang mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang dalam:
 - 1) Adaptasi terhadap kebutuhan situasional.
 - 2) Pencapaian tujuan-tujuan.
 - 3) Integritas atau pengaturan tata hubungan.¹⁷
- d. Teori Ekonomi Gunar Mirda mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencangkup.
 - 1) Hasil dan pendapatan
 - 2) Tingkat produktivitas
 - 3) Tingkat keidupan
 - 4) Sikap dan pranata
 - 5) Rasioanalitas

Terkait dengan teori ini Rostow mengemukakan adanya tahapan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat tradisonal yaitu persiapan tinggal

¹⁷Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2007), hlm 119-120.

landas, dorongan menuju kematangan serta konsumsi masal yang sangat tinggi.

- e. Teori Konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antar kelas antara kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas yang tertindas (buruh).
- f. Teori Ekologi yang dikemukakan oleh Odum tentang hubungan antar manusia dengan lingkungannya (fisik sosial). Menurutnya pembangunan terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah, maupun optimasi pemanfaatan sumber daya alam yang semakin terbatas.
- g. Teori Ketergantungan yang berkembang di Amerika Latin sebagaimana dilaporkan oleh Frank dimana negara maju mendominasi negara yang belum berkembang, sedemikian rupa sehingga pembangunan di negara yang belum maju sangat tergantung kepada kehendak/kebutuhan negara maju yang menjadi penjajahnya.¹⁸

Akan halnya dengan kecenderungan konsep pembangunan yang berkembang di Indonesia Whiratnolo dan Dwijiwonoto mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Strategi pertumbuhan
- 2) Partumbuhan dan Distribusi

¹⁸*Ibid.*, hlm120-121

- 3) Teknologi tepat guna
- 4) Kebutuhan Dasar
- 5) Pembangunan berkelanjutan
- 6) Pemberdayaan¹⁹

Tentang keenam konsep pembangunan tersebut Kartasmita menjelaskan sebagai berikut:

Pembangunan menurut kepustakaan ekonomi pembangunan, sering kali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambung untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Dari pandangan itu lahir konsep-konsep mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi.

Teori mengenai pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidaknya sejak abad k-18. Menurut Adam Smith proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggaris bawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁰

Setelah Adam Smith muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha mengkaji batas-batas pertumbuhan (*limits to growth*) antara lain Malthus dan Ricardo yang

¹⁹*Ibid.*, hlm 121-122

²⁰Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 67-68.

disebut sebagai aliran klasik, dan berkembang *teori pertumbuhan ekonomi modern* dengan berbagai variasinya yang pada intinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang menekankan pentingnya akumulasi modal dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.²¹

Salah pandangan yang dampaknya besar dan berlanjut hingga sekarang adalah model pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod dan Domar. Pada intinya model ini berpijak pada pemikiran Keynes yang menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang.²²

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap. Pembagian dana desa ini dihitung berdasar empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Pengertian dana desa menurut peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

²¹Bruce Herrick dan Charles P. Kindleberger, *Economic Development Fourth Edition*, (New York: McGraw Hill Book Company, 1983), hlm. 49-50.

²²*Ibid.*, hlm.50-51

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.²³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72 Ayat 2 menyatakan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Penjelasan pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah
- d. Tingkat kesulitan geografis²⁴

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

²³Rangka Pengentasan Kemiskinan, (pdf), (Surabaya: Program Studi Manajemen dan Akuntansi, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, 2013), dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/111956-ID-none.pdf> diakses pada hari/tanggal: Senin/24 Februari 2021, pukul: 21.30 WIB

²⁴ Unang Sunardjo, *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. (Bandung: Tarsito, 2011), hlm.90.

Alokasi dana desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang diterapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10% sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa.²⁵

2. Sasaran dan Tujuan Dana Desa

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian dana desa ini adalah sebagai berikut:

- a. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi. Dengan adanya dana desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan

²⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama.2017),hlm.68.

kemiskinan. Peroritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian masyarakat.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dari penjelasan penggunaan dana desa tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunaan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan Kepala Lembaga masyarakat desa, BUMDES, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat

desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.²⁶

3. Penganggaran Dana Desa

a. Definisi Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan diakuntifikasikan dalam satuan uang sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran adalah suatu komitmen resmi manajemen yang terkait harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang untuk lebih spesifik. Pengertian anggaran perusahaan adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan yang dijelaskan dalam sebuah kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengestimasi operasi perusahaan kedalam estimasi keuangan.

Dana desa adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kabupaten/Kota. Itulah dana yang dibelanjakan untuk pembiayaan

²⁶Unang Sunardjo, *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. (Bandung: Tarsito, 1984), hlm.205.

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana bagi desa diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan penghitungan rincian dana desa setiap desa.²⁷

Tata cara penganggaran dana desa diatur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengatur secara terperinci bagaimana dana desa dianggarkan. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa, rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan tiga hal yaitu:

- 1) Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata diseluruh Indonesia. Besaran nilainya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional diseluruh Indonesia.
- 2) Alokasi afirmasi dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 3) Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.²⁸

²⁷Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa

²⁸Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2007), hlm 127-128.

Pasal 4 ayat 1 menjabarkan rumus perhitungan dana desa setiap Kabupaten/Kota dengan rumusa sebagai berikut:

$$DD \text{ Kab/Kota} = AD \text{ Kab/Kota} + AA \text{ Kab/Kota} + AF \text{ Kab/Kota}$$

$$DD \text{ Kab/Kota} = \text{Dana Desa setiap Kabupaten/Kota}$$

$$AD \text{ Kab/Kota} = \text{Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota}$$

$$AA \text{ Kab/Kota} = \text{Alokasi Afirmasi setiap Kabupaten/Kota}$$

$$AF \text{ kab/Kota} = \text{Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota}$$

Pada ayat 2 ini menjelaskan Alokasi Dana dihitung sebesar 77% dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa. Ayat 3 menjelaskan, alokasi afirmasi dihitung sebesar 3% anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin.²⁹

Dijelaskan pada ayat 4 status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 3 bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ayat 5 menjelaskan data jumlah penduduk miskin sebagaimana maksud ayat 3 bersumber dari kementerian sosial. Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal

²⁹Marconi dan siegel, *Behavioral Accounting South Western Publishing*, (Ohoi: Cincinnati), hlm. 35.

yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 3 merupakan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.³⁰

Ayat 7 Pagu Alokasi Fomula dihitung sebesar 20% (dua Puluh Persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah
- d. 25% (dua pulu lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis³¹

Ayat 8 Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKK Kabupaten/Kota.³²

³⁰Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa*. (Bandung: CV. Armico. 1988), hlm. 102.

³¹<https://www.kbbi.web.id/peran>, diakses pada 20 Februari 2021 Pukul 12:45 WIB.

³²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga.2011), hlm.78.

4. Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembanguna dan sumber-sumber dananya untuk membangun desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai panduan bagi Pemerintah Desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain, seperti mengajukan pinjaman.
- d. Memberikan kewenangan pada Pemerintah Desa dalam penyelenggaran administrasi desa.
- e. Memberikan arahan bagi Pemerintahan Desa dalam penyelenggaran dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
- g. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.³³

³³Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Sleman: Pustakan Baru Press), hlm. 124

C. Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa

1. Prinsip Penggunaan

Sesuai dengan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Desa, semua pembangunan di desa harus mengikuti serta masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan. Undang-Undang Desa juga mendapatkan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengaruh keutamaan perdamaian dan kedilan sosial. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 Permendes 2017, pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan Untuk:

- a. Memberikan acuan program kegiatan bagi penyelenggara kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.
- b. Memberikan acuan bagi Pemerinatah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa.
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam memantau dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.³⁴

³⁴Damsar Dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. (Jakarta: Kencana. 2016), hlm.120.

2. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebut tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan Prioritas: mendaulukan kepentingan desa yang lebih mendesak lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Terfokus: Mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- e. Parisifatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serat masyarakat desa.
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dibiayai dana desa.

- g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan diwilayah desa dan atau wilayah kabupaten/kota.
- h. Berbasis sumber daya desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada didesa daam pelaksanaana pembangunan yang dibiayai dana desa.
- i. Tipologi desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosilogis, antropologis, ekonomis dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.³⁵

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 4 Bab III Menteri Desa, pembangunan daerah dertinggal, dan Trasn migrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang drioritas penggunaan dana desa Tahun 2019.

Proritas pembangunan dana desa yan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dana Desa di Prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Prioritas pembangunan dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

³⁵Sumiati, *Pengalokasian Dana Desa*, (Studi kasus :Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, 2015). *Jurnal Katalogis*. Vol,3.pp.135-142.

- c. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa.³⁶

D. Kajian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti mengambil kajian terdahulu dari:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Choirur Rijal Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan agar dapat memanfaatkan program yang telah dibentuk oleh pemerintah desa melalui Anggaran Dana Desa di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian utama adalah kepala Desa serta Jajaran dan Masyarakat setempat. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.³⁷
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurliana Tahun 2017 yang melakukan penelitian tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajam Pasar Utara “ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses

³⁶Icuk Ranga Bawono, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), hlm. 86.

³⁷Choirur Rijal Tahun 2019, judul: *Pemerintah Desa melalui Anggaran Dana Desa di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati*.

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di desa Sukomulyo, Pemerintahan Desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan alokasi dana desa, namun karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparat Pemerintah Daerah terhadap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sehingga pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang dan membuat pembangunan fisik kurang tepat sasaran.³⁸

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hargono pada Tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Hasil penelitian menyatakan analisa yang dilakukan di empat desa pada empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem. Bali menunjukkan bahwa penyaluran alokasi dana desa di empat desa tersebut belum mencapai efektivitas yang optimal. Hasil yang diperoleh bahwa besarnya alokasi dana desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditemukan dengan pembodohan tujuh variabel penting desa tidak menggunakan pembagian total jumlah desa di kabupaten untuk menentukan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah benjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional). Hasil perhitungan ini dianggap tidak adil bagi desa, sehingga menimbulkan tidak efektifan

³⁸Nurliana Tahun 2017 judul: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajam Pasar Utara.*

penyaluran ADD, Pemanfaatan ADD tidak disalurkan pada bidang yang dapat menggerakkan ekonomi desa.³⁹

³⁹Hargono pada Tahun 2019 judul: *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Alasan saya meneliti dilokasi ini adalah untuk mengetahui program apasaja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, populasi disebut juga *univers* tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sample.⁴⁰

Populasi dalam penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Desa Melalui Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat terdiri Dari:

- a. Aparat Desa Teluk 8 Orang.
- b. Tenaga penyuluhan dari Kecamatan 1 orang,
- c. Tenaga pendamping dari kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai ketua coordinator 1 orang.

⁴⁰Wardi Bactiar, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Loga, 1997), hlm.83

d. Masyarakat Desa Teluk dalam penelitian berjudul Peran Pemerintah Desa Melalui Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sebanyak 5 kepala keluarga.⁴¹

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Untuk penetapan sampel penulis menggunakan teknik *non-rondam sampling* yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.

Untuk lebih jelasnya, teknik non random sampling ini penulis gunakan jenis *snowball sampling*. Snowball sampling merupakan salah satu metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Dimana *snowball sampling* adalah termasuk dalam teknik *non-probability sampling* (sampel dengan probabilitas yang tidak sama).⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditetapkan kreteria atau cirri-ciri dari populasi yang dijadikan sampel sebagai berikut:

1. Aparat desa yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.
2. Tenaga penyuluhan atau pendamping kecamatan.
3. Tenaga pendamping internal atau masyarakat.

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas UGM, 1983), hlm. 80

⁴²*Ibid* ..., hlm.84

Berdasarkan kriteria diatas populasi dari anggota kelompok pemberdayaan yang memenuhi syarat dijadikan sampel adalah 5 orang petugas ADD dan 8 orang masyarakat anggota kelompok pemberdayaan. Guna melengkapi data penelitian, penulis mengambil informan 3 orang, yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua BPD Desa Teluk jadi keseluruhan sampel 16 orang.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, agar peneliti bisa mendapatkan data yang jelas dari informan. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴³ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkahlaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh.

Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah program apa saja yang di bentuk oleh Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui anggaran dana desa di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

⁴³V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019), hlm. 19.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Berikut hasil wawancara menurut Bapak Mulyanto yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa kepada Kepala Desa sekarang kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.⁴⁴ Dan salah seorang anggota masyarakat, yaitu Ibu Supiyem yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Teluk tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Teluk ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak.⁴⁵
2. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan dengan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek-aspek dalam fenomena tersebut. Adapun yang diamati dalam penelitian ini

⁴⁴Mulyanto, *Warga Desa Teluk*, Wawancara pada tanggal 29 Juni 2021

⁴⁵Supiyem, *Warga Desa Teluk*, Wawancara pada tanggal 30 Juni 2021

adalah program apa saja yang dibuat oleh Pemerintah Desa dalam membangun masyarakat di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Setelah peneliti terjun langsung kelapangan maka peneliti mengamati bahwasanya Pemerintah Desa Teluk sudah cukup baik dalam mejalanka tugasnya dengan membuat program ataupun kegiatan yang dapat menguntungkan masyarakat melalui anggaran dana desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa Teluk melakukan pembangunan terhadap Desa Teluk contohnya seperti Lening Parit yang dilakukan di Desa Balai Gajah dan Desa Melayu yang tujuannya menghindari agar parit tidak meluap ketika hujan desor dikarenakan tersumbat oleh sampah. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Desa Teluk yaitu harus selalu melibatkan masyarakat dalam apapun dan juga *transparansi* mengenai anggaran dana desa. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dana tersebut di alokasikan untuk apa saja.

3. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data-data yang relevan. Dokumentasi peneliti terdapat di lampiran.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data pokok yang di peroleh langsung dari informan yang menjadi Kepala Desa Teluk Kecamatan Secanggang serta dari Kepala Dusun dan kemudian tidak lupa juga adanya informan dari masyarakat serta hasil dari pengamatan di lapangan. Kepala Desa Teluk menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat melalui anggaran dana desa yang dimana setiap program atau kegiatan yang bentuk menggunakan anggaran dana tersebut sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.
2. Sumber data sekunder yaitu data pelengkap atas data-data yang memberikan keterangan atau informasi tambahan kepada peneliti yang peneliti peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku salah satunya yang berjudul Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa yang di tulisa oleh Icuk Rangga Bawono dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik yang di tulis oleh Totok Mardikanto.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian ini direncanakan menggunakan tiga orang. Tetapi jika dilapangan ternyata masih dipandang perlu sebagai penopang kuat data tambahan informasi, maka informan penelitian akan bertambah jumlahnya, sampai data yang

diperoleh sudah jenuh atau berulang-ulang. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah:

Nama	Jabatan	Usia	Keterangan
Sutinah	Kepala Desa	52	Wawancara
Saniyah	Sekretaris Desa	48	Wawancara
Suratman	Kepala Dusun	43	Wawancara
Arianto	BPD	37	Wawancara
Sudiono	Warga	28	Wawancara
Kumala sari	Warga	42	Wawancara
Kijum	Warga	45	Wawancara
Fadli	Wagra	45	Wawancara
Ngasinem	Warga	53	Wawancara
Juli	Warga	47	Wawancara
Supiyem	Warga	55	Wawancara
Jasmun	LPM	36	Wawancara
Mulyanto	Warga	54	Wawancara
sudionto	Warga	26	Wawancara
Candra Juherawan	Bendahara	23	Wawancara
Salami	BPD	47	Wawancara
Mujiono	Warga	50	Wawancara
Kaslam	Warga	52	Wawancara
Yanti	Warga	53	Wawancara
Sumintri	Warga	44	Wawancara

Adapun alasan peneliti menjadikan nama-nama yang tercantum diatas sebagai informan penelitian dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berperan aktif

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan merekalah orang yang lebih mengetahui mengenai desa tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Dalam studi kualitatif, analisis data adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk menyeleksi, mengkategorikan, membandingkan, mensintesa, dan menginterpretasi data untuk membangun suatu gambaran komprehensif tentang fenomena atau topik yang sedang diteliti. Karena itu, sebagaimana dinyatakan Merriam, analisa data merupakan proses memberi makna terhadap suatu data. Data diringkas atau didapatkan dan dihubungkan satu sama lain kedalam sebuah narasi sehingga dapat memberi makna kepada para pembaca. Proses itu, menurut Taylor dan Bogdan adalah menarik sejumlah kesimpulan dan generalisasi yang rasional berdasarkan sekumpulan data yang diperoleh.⁴⁶

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka datanya dipaparkan dengan cara deskriptif, setelah semua yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Untuk proses penganalisaan data, maka penganalisa melakukan analisis domain (*domain analysis*) maksudnya adalah peneliti hanya di targetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus merinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek yang diteliti.

⁴⁶V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019), hlm. 23.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. *Reduksi* data yaitu penelitian akan melakukan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya.
2. *Display* data yaitu setelah data direduksi, peneliti menyajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
3. *Conclusion drawing/verification* yaitu setelah data selesai disajikan dalam bentuk teks dan naratif, proses berikutnya peneliti menarik kesimpulan atau verifikasi.⁴⁷

⁴⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 129

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Teluk

1. Sejarah Singkat Desa Teluk

Pada mulanya ada sekelompok masyarakat yang menempati atau mendiami suatu perkampungan ditepi atau pinggiran Sungai Wampu yang berbentuk Teluk yaitu sebelum Tahun 1920-an atau yang disebut perkampungan orang Melayu asli.

Kemudian dibentuklah suatu kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang bernama Ok.Tarak yang memimpin kampung tersebut. Setelah Ok.Tarak wafat maka untuk meneruskan kepemimpinannya diangkatlah putra atau anak lelakinya yang bernama Ok.Maksum dan setelah ujur oleh Datuk atau Kepala Distrik Hinai yaitu Datuk Liuk diangkat putra dari Ok.Maksum tersebut sebagai pelaksana Kepala Kampung sampai dengan tahun 1942 sebelum jaman kemerdekaan atau jaman jepang.

Setelah itu masuklah program Transmigrasi tahun 1959 yang oleh Pemerintah Kecamatan diarahkan ke Kampung Teluk, sehingga kampung tersebut penduduknya menjadi bercampur baur dan berkembang serta menjadi maju dengan mayoritas penduduknya didominasi oleh suku Jawa.

Kemudian pada tahun 1964 diadakan pemilihan Kepala Kampung dan terpilihlah Saudara.Itam sebagai Kepala Kampung Teluk sehingga sampai dengan tahun 1985 setelah ada perubahan sebutan kampung menjadi Desa tahun 1979.

2. Pemimpin Desa

Dalam 10 Priode Pemerintah Desa Teluk telah dipimpin oleh 6 orang Kepala Desa yaitu Terdiri dari:

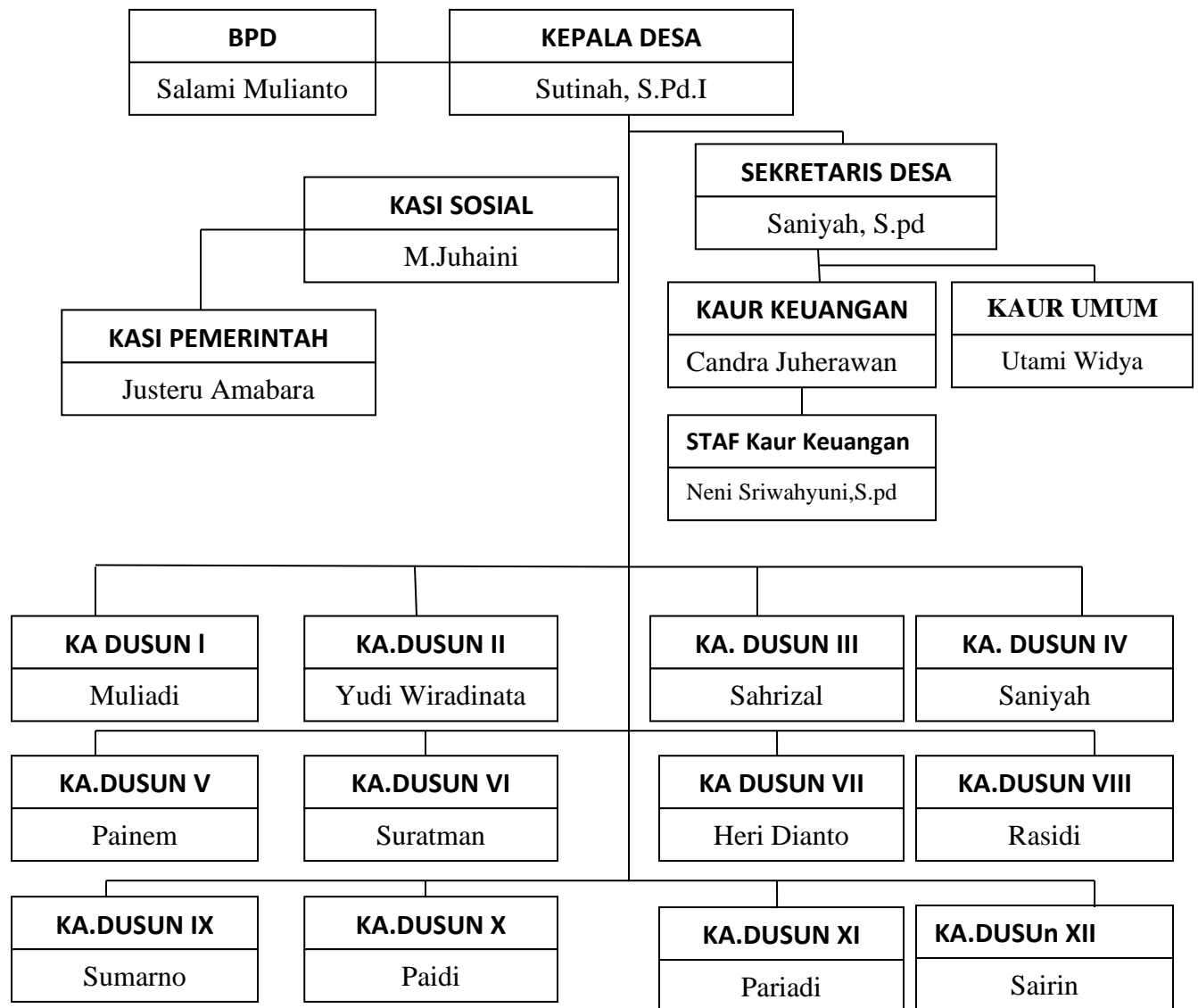
- a. Bapak Ok.Tarak masa jabatan 1920 s/d 1931 beliau adalah Kepala Desa pertama yang disebut juga Kepala Kampung.
- b. Bapak Ok.Maksum masa jabatan 1931 s/d 1942 menurut penuturan orang-orang tua beliau ini adalah orang yang sangat bersahaja dan sangat disukai karena kebaikannya.
- c. Bapak Itam masa jabatan 1942 s/d 1993 yaitu masa yang sangat lama menjadi Kepala Desa Teluk yang menandakan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat disukai oleh masyarakat dikarenakan kebaikannya dan kebijaksananya dalam memimpin dan pada masa kepemimpinannya beliau adalah kampung menjadi desa.
- d. Ibu Sutinah masa jabatan 1993 s/d 2010 Kepala Desa ini tidak kurang lamanya dua Priode dalam masa kepemimpinannya banyak kemajuan Desa Teluk menjadi Desa yang terbaik di Kabupaten Langkat. Beliau berhenti menjadi Kepala Desa pada masa itu tidak diperbolehkan tiga Priode.

- e. Bapak Ruswanto masa jabatannya 2010 s/d 2016 beliau ini adalah Kepala Desa yang sangat Merakyat dibuktikan dengan kepedulian beliau pada saat masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan didusun hampir semua kegiatan beliau hadir.
- f. Bapak Suwato masa jabatan Januari 2016 s/d Mei 2016 Beliau adalah Kepala Desa pelaksana yang dihunjak oleh pihak Kecamatan Secanggang untuk mengisi kekosongan menunggu masa pemilihan Kepala Desa yang baru, pelaksana Kepala Desa ini adalah sosok yang sangat baik dan rendah hati beliau selalu membaaur pada masyarakat disetiap kegiatan di desa.
- g. Ibu Sutina menjabat pada Juni 2016 s/d hingga saat ini. Sosok Kepala Desa yang satu ini adalah Kepala Desa yang diharapkan oleh masyarakat terbukti terpilihnya kembali beliau menjadi Kepala Desa Teluk setelah satu priode dijabat oleh orang lain. Dengan tekad dan semangat yang kuat melalui Visi dan Misinnya untuk mewujudkan Desa Teluk yang maju dan terarah.

3. Struktur Kepengurusan Desa Teluk

Desa Teluk dipimpin oleh Ibu Sutinah dalam tugasnya Kades (Kepala Desa) dibantu oleh aparat desa lainnya.Ibu Saniyah sebagai Sekretaris Desa bertugas menertibkan bidang administrasi dan Bapak Candra Juherawan yang bertugas sebagai Bendahara Desa.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TELUK
KECAMATAN SECANGGANG**



Wilayah Desa Teluk dibagi menjadi 12 dusun yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun 1 Pajak yaitu Bapak Muliadi, Kepala Dusun II Balai gajah dipimpin oleh Bapak Yudi Wiradinata, Kepala Dusun III Melayu di pimpin oleh

Bapak Sahrizal, Kepala Dusun IV Parit kaca I dipimpin oleh Bapak Saiyan, Kepala Dusun V Parit kaca II dipimpin oleh Bapak Adi , Kepala Dusun VI Parit kaca III yaitu dipimpin oleh Bapak Suratman, Kepala Dusun VII Parit kaca IV yaitu dipimpin oleh Bapak Heridianto, Kepala Dusun VII Sido bangun yaitu dipimpin oleh Bapak Rasidi, Kepala Dusun IX Lubuk rotan I yaitu dipimpin oleh Bapak Sumarno, Kepala Desa X Lubuk rotan II yaitu dipimpin oleh Bapak Paidi, Kepala Dusun XI Lubuk rotan III yaitu dipimpin oleh Bapak Pariadi, Kepala Dusun XII Lubuk rotan IV yaitu dipimpin oleh Bapak Sairin.⁴⁸

Tabel 4.1
Jumlah Dusun di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Nama Desa	Jumlah Kepala Dusun	Jumlah Dusun
Teluk	12	Dusun Pajak Dusun Balai Gajah Dusun Melayu Dusun Parit kaca I Dusun Parit kaca II Dusun Parit kaca III Dusun Parit kaca IV Dusun Sido Bangun Dusun Lubuk rotan I Dusun Lubuk rotan II Dusun Lubuk rotan III Dusun Lubuk rotan IV
Jumlah	12	12

Sumber: Profil Desa Teluk 2021

⁴⁸Profil Desa Teluk, dicatat Tanggung 08 juni 2021

4. Demografis Desa Teluk

Penduduk wilayah Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat terdiri dari penduduk asli Jawa dan penduduk pendatang dari luar daerah Jawa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Monografi di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, jumlah penduduk Desa Teluk tahun 2021 yaitu 4946 jiwa.

a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Teluk memiliki 2 jenis kelamin yaitu kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1394 KK.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Desa Teluk berdasarkan Jenis Kelamin

a	Jumlah Laki-laki	2620 Orang
b	Jumlah Perempuan	2326 Orang
c	Jumlah total a+b	4946 Orang

Sumber: profil Desa Teluk 2021, dicatat tanggal 8 Juni 2021.⁴⁹

b. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat memiliki penduduk yang berusia mulai dari 0-12 bulan sampai dengan usia 75 tahun.

⁴⁹Profil Desa Teluk, dicatat tanggal 08 Juni 2021

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Laki-laki (orang)	Jumlah Perempuan
1-5 tahun	286	153
6-10 tahun	209	209
11-15 tahun	270	245
16-20 tahun	180	203
21-30 tahun	278	215
31- 40 tahun	203	214
41-50 tahun	298	258
51-60 tahun	286	208
61-70 tahun	260	199
>70 tahun	353	330
Jumlah	2623	2234

Sumber: profil Desa Teluk, dicatat tanggal 08 Juni 2021⁵⁰

c. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian

Berdasarkan mata pencarian, sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Teluk adalah petani, terutama petani kebun/ dan sawah. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, buruh dan kuli bangunan.

⁵⁰Profil Desa Teluk, dicatat tanggal 08 Juni 2021

Kebun atau sawah masyarakat Desa Teluk biasanya ditanami oleh masyarakat dengan padi, sawit atau jambu madu. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat Teluk rata-rata cukup luas yakni sekitaran 2-3 ha.

Banyak dari masyarakat Desa Teluk yang memanfaatkan lahan yang mereka miliki dengan menanam padi dan jambu madu yang mana jambu madu ini memiliki nilai jual yang lumayan tinggi, sehingga banyak masyarakat Desa Teluk yang tertarik menanam jambu madu.

Selain itu ada juga masyarakat yang Desa teluk yang menjadi seorang pedagang hal ini dikarenakan Desa Teluk dekat dari pekan atau pasar sehingga banyak dari masyarakat yang berdagang.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah pembelajaran pengetahuan, sebuah keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi bawahnya dengan melalui pengajaran, pelatihan atau bisa dikatakan penelitian. Pendidikan umumnya dibagi menjadi beberapa tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi Universitas ternama.

Tingkat pendidikan semakin baik maka secara tidak langsung memperbaiki tingkat kehidupannya dengan layak sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat begitu juga halnya Desa Teluk.

Pendidikan di Desa Teluk terbilang sudah lumayan membaik terbukti dari banyaknya jumlah sekolah, siswa dan tenaga kerja. Walau demikian masi ada

beberapa anak yang tidak menuntaskan sekolahnya karena tergiur akan pekerjaan demi mendapatkan uang.

Tabel 4.4

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Negeri/Swasta di Desa Teluk Kecamatan secanggih Kabupaten Langkat

NO	Tingkat	Sekolah	Guru	Murid
1	TK	4	13	113
2	SD	4	32	532
3	SMP	5	12	121
4	SMA	1	11	123
Jumlah		14	68	889

Sumber: Sumber: profil Desa Teluk, dicatat tanggal 09 Juni 2021⁵¹

e. Sosial keagamaann

Masyarakat Desa Teluk Kecamatan Secanggih 90% menganut Agama Islam dan 10% sisanya ada yang Kristen dan Kuatnya agama Islam di Desa Teluk di pengaruhi oleh kuatnya nuansa Islam dalam adat istiadat yang ada disana.

Kuatnya agama Islam di Desa Teluk Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat bukan berarti masyarakat Desa Teluk tidak bisa menerima masyarakat yang beragama lain.

⁵¹Profil Desa Teluk, dicatat tanggal 09 Juni 2021

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Pengelolaan alokasi dana desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan berdasarkan Peraturan No.72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah dipertegas dengan lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini menjawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kasi desa.

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat merupakan proses pengendalian, pengaturan, pengurusan, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “ harta rampasan Fa’I yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Pengalokasian alokasi dana Desa Teluk ini dikelola langsung oleh aparat desa, Kepala Desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan Sekretaris Desa sebagai ketua pelaksana program. Dalam hal ini pada tahun 2020 ADD yang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp.253.712.000 sisanya dipergunakan untuk biaya perawatan desa dan di bidang lainnya.

1. Tahapa Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan yang dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan disatukan oleh lembaga kemasyarakatan didesa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkanseluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa disebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam penyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan didesa. Sehingga rencana suatu kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksdu kegiatan Musrembang Desa, lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.5

Tahap Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam kegiatan Musrembang

Variabel	Indikator	Ukuran	Pertisipasi (Orang)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	10
		Hadir dan berpendapat	-
		Tidak hadir	10
		Total	20
	Pokok Pembahasan	Jumlah Anggaran	10
		Penyusun Rencana	3
		Tidak tahu	7
		Total	20
	Hasil Musrembang	Tersusunya DURK	-
		Belum Tersusunya DURK	13
		Tidak Tahu	7
		Total	20
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	4
Tidak Ada		10	
Tidak Tahu		6	
Total		20	

Sumber: Data diolah dari Kantor Desa Teluk Tahun 2020 Keterangan DURK (Daftar Usaha Rencana Kerja)⁵²

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi dalam Musrembang dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk. Dari 20 responden kalangan masyarakat, sebanyak 10 orang yang menghadiri kegiatan Musrembang Desa tersebut, tetapi

⁵²Data diolah dari Kantor Desa Teluk Tahun 2020 Keterangan DURK (Daftar Usaha Rencana Kerja)

mereka tidak menyampaikan aspirasi rencana kegiatan. Sedangkan 10 lainnya tidak hadir.

Begitu penjelasan Ibu Sutinah selaku Kepala Desa Teluk mengenai tahapan perencanaan pengelolaan ADD dari partisipasi masyarakat Desa Teluk dalam kegiatan Musrembang. Dalam proses Musrembang yang akan dilakukan partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sekitar 15% dari total masyarakat yang produktif ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat Musrembang Desa yang sedang berjalan. Dikarenakan masyarakat memiliki kesibukan juga sehingga membuat masyarakat kurang peduli terhadap kegiatan yang Pemerintah Desa bentuk.

Selanjutnya Tabel 4.5 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses Musrembang Desa, Pemerintah juga kurang transparan memberikan informasi kepada masyarakat, dari 20 responden, hanya 3 orang yang mengatakan bahwa dalam Musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang dilakukan, sebanyak 10 orang lainnya mengatakan bahwa dalam Musrembang Pemerintah Desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan sisanya sebanyak 7 orang mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu Bapak Sudianto yang mengatakan bahwa kami masyarakat desa ini masih bingung dan kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk pembangunan desa ditambah lagi Pemerintah Desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar saja kalau saya pribadi dan sejumlah

masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena kami tidak tahu harus berbicara apa.⁵³

Penyusun rencana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang di DURK kembali diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan dan kesepakatan kepada masyarakat. Akan tetapi dari Tabel 4.5 diatas terlihat bahwa dari 20 orang total responden hanya 3 orang mengatakan bahwa DURK diinformasikan kepada masyarakat, sebanyak 11 orang mengatakan bahwa tidak adanya informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 6 orang mengatakan tidak tahu.

Dan lain yang dikatakan oleh ketua LPM Desa yaitu bapak Jasmun yang mengatakan rencana pembangunan yang akan dilakukan atau dilaksanakan di Desa Teluk ini memang tidak disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Masyarakat hanya menjadi pononton yang menyaksikan setiap kegiatan yang terjadi didesa.

Dari beberapa hasil wawancara penelitian dengan beberapa informan pada tahap perencanaa yaitu Ibu Sutinah selaku Kepala Desa dan Bapak Salami Muilanto sebagai BPD, Jasmun selaku Ketua LPM dan Sudianto selaku masyarakat Desa Teluk. Penelitian menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya *transparasi* dari pihak Pemerintah Desa dalam pengalokasian dana desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan rencana pembangunan

⁵³Sudianto, *Warga Desa Teluk*, Wawancara Pada tanggal 29 Juni 2021

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Teluk.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusun rencana kegiatan alokasi dana desa yang tertuang dalam DURK dapat terselsaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya *transparasi* informasi dari pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat masih kurang baik.

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan pengeloa alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Teluk didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Langkat No 1 tahun 2020 tentang alokasi dana desa, alokasi dana diperuntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa dan BPD, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 tentang pendapatan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan alokasi dana desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun anggaran 2020, besaran alokasi dana desa yang

diperoleh Desa Teluk adalah sebesar Rp.253.712.000 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu).

Adapun terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Teluk dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut

Tabel 4.6
Alokasi Penggunaan Anggaran Dana Desa

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pembangunan Desa	Pembangunan Rambat Beton di Lubuk Rotan III	52.741.000
	Lening Parit di Dusun Melayu	54.154.000
	Lening Parit Balai Gajah	67.760.000
	Perbaikan Gedung Olahraga	79.057.000
Total		253.712.000

Sumber: Diolah dari Lapangan pertanggung jawaban Desa Teluk tahun 2020⁵⁴

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Teluk adalah sebesar Rp.253.712.000, dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Teluk diperuntukan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, pembuatan rambat beton di lubuk rotan III sebesar 52.741.000, pembuatan lening parit di dusun melayu sebesar Rp.54.154.000, lening parit di balai gajah sebesar Rp.67.760.000, perbaikan gedung olahraga Rp.79.057.000.⁵⁵

⁵⁴Diolah dari Lapangan Pertanggung jawaban Desa Teluk tahun 2020

⁵⁵Rincian Anggaran Biaya Tahunan 2020

Informasi yang diperoleh dari beberapa responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teluk bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Hal ini dilihat dalam proses kegiatan yang ada di Desa Teluk yaitu pembangunan rambat beton, lening parit di Dusun Melayu, lening parit di Dusun Balai Gajah dan perbaikan gedung olahraga informasi yang diperoleh dari 20 responden bahwa kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Teluk yaitu Ibu Sutinah yang menyatakan tingkat kepedulian masyarakat kegiatan pembangunan sangat rendah, jangankan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat Musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah dikumpulkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan Pemerintahan Desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, Pemerintahan Desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan didesa.

Bapak Mulyanto yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa kepada

Kepala Desa sekarang kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.⁵⁶

Lain lagi yang dikemukakan oleh Ibu Ngasinem yang menyatakan bahwa kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan desa yang humoris, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik sangat rendah sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat.⁵⁷

Informasi yang diperoleh dari beberapa responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teluk bahwa tingkat partisipasi dari setiap kegiatan dan tahapan pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan Desa Teluk. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berjalan dengan baik karena mempermudah masyarakat dalam menjual hasil tani dan bepergian. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh desa masyarakat dan itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

3. Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dalam tahapan pertanggung jawaban ini efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak disusun oleh

⁵⁶Mulyanto, *Warga Desa Teluk*, Wawancara pada tanggal 29 Juni 2021

⁵⁷Ngasinem, *Warga Desa Teluk*, Wawancara pada tanggal 29 Juni 2021

Pemerintah Desa, namun penyusunan laporan pertanggung jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Teluk serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggung jawaban mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 4.7
Penilaian Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan ADD

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)
Pertanggung Jawaban	Pihak Penyusunan LPJ	Pemerintah desa bersama BPD	10
		Pihak Lainnya	2
		Tidak tahu	8
		Total	20
	Kualitas LPJ	Baik	15
		Tidak Tahu	5
		Total	20
	Evaluasi Kegiatan	Ada	6
		Tidak Ada	10
		Tidak Tahu	4
Total		20	

Sumber: Diolah dari Kantor Desa Teluk Tahun 2020⁵⁸

Dari tabel diatas dapat dilihat dari total responden sebanyak 10 orang mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh Pemerintah Desa bersama BPD, sedangkan 2 orang lainnya mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lain yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak Pemerintah Desa Teluk. Sedangkan sisanya sebanyak 8 orang tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggung jawaban Desa Teluk tersebut.

⁵⁸Diolah dari Kantor Desa Teluk Tahun 2020

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggung jawaban Desa Teluk memang tidak disusun oleh Pemerintah Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh Bendahara Desa Teluk itu Bapak Chandra Juherawan yang menyatakan kualitas Pemeritah Desa Teluk tergolong rendah karna banyak yang hanya tamatan SMA sehinga kurangnya pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini dan menjadi hambatan kami sebagai pemerintah desa juga data yang kami miliki tidak tersimpang sehingga kami sulit dalam mengelola anggaran tersebut dan juga kami sangat tidak memahami pengoperasian komputer.⁵⁹

Selanjutnya pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa laporan pertanggung jawaban Desa Teluk sudah baik, dimana dari 20 responden sebanyak 15 orang mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat Pemerintah Desa Teluk dijadikan percontohan untuk semua desa di Kecamatan Secanggang.

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran dana desa ini bahwa seluruh kegiatan harus dievaluasi bersama bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban kepada Pemerintah tidak hanya melakukan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah

⁵⁹ Candra Juerawan, *Bendaharan Desa Teluk* , wawancara tanggal 30 juni 2021

Kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Teluk melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Teluk. Dari 20 responden hanya 6 responden yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Teluk dan sebanyak 10 orang responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun 4 orang lainnya mengatakan tidak tahu apakah Pemerintah Desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Salah seorang anggota masyarakat, yaitu Ibu Supiyem yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Teluk tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Teluk ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak.⁶⁰

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Mala yang menyatakan bahwa yang saya ketahui Pemerintah Desa tidak pernah melakukan pertanggung jawaban dihadapan masyarakat Desa Teluk ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Teluk.

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti diatas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa Teluk dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya

⁶⁰Supiyem, *Warga Desa Teluk*, Wawancara pada tanggal 30 Juni 2021

pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Teluk namun Pemerintah Desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teluk dapat dikatakan kurang efektif.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Anggaran Dana Desa

Pengelolaan ADD dan Keuangan Desa yang lainnya sesuai faktor-faktor-faktor yang memiliki peranan dalam mendorong dan menghambat keberhasilan pengelolaannya.

Faktor yang mendorong keberhasilan tersebut meliputi:

1. Usaha pemimpin desa menjadi suri tauladan.
2. Adanya tenaga pembantu keuangan dalam pengimputan ke Siekudes.
3. Peraturan pengelolaan ADD sudah jelas dalam bentuk juknis.
4. Masyarakat dapat mengawasi kegiatan secara langsung.
5. Budaya gotong royong masih dilestarikan.

Faktor Penghambat Pengelolaan ADD di Desa Teluk meliputi:

1. Penggerakan yang dilakukan pemimpin masih belum meningkatkan pemahaman masyarakat.
2. Keterbatasan usia dan kemampuan teknologi dari Bendahara pengelola keuangan.

3. Kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data dukung untuk pelaporan kegiatan.
4. Belum pelaporan langsung kepada masyarakat.
5. Prioritas keuangan masih untuk pembangunan fisik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyimak uraian-uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa informan dan Kepala Desa Teluk bahwa peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Anggaran Dana Desa yang dilakukan selama ini bisa dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan partipasi dari beberapa masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat diantaranya yaitu:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
 - 2) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan karena kesadaran untuk membangun desa.
 - 3) Adanya dana desa yang diberika Pemerintah Pusat untuk Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Kurangnya transparansi data atau pun anggaran dana desa kepada masyarakat.
 - 2) Kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data dukung untuk pelaporan kegiatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan Musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, *transparansi* informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Teluk kepada masyarakat Desa Teluk. Kemudian pada tahap pelaksanaan dan proses pertanggung jawaban perlunya aparat Pemerintah Desa Teluk melakukan tranparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian dana desa sesuai yang diharapkan masyarakat.
2. Dan diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan agar dapat memberikan tanggapan atau masukan kepada Pemerintah Desa terhadap kebijakan yang telah diberikan.
3. Program yang sudah di jalankan yang sudah dianggap baikoleh Peerintah Desa Teluk dan masyarakat harus tetap di pertahankan dan lebih dikembangkan lagi.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik utnutk melakukan penelitian dengan topic yang serupa, penulis menyarankan agar selanjutnya bisa memberikan yang lebih baik dari sudah ada skripsi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim An-Nur surah Ar-Rad ayat 11
- Azam Awang , 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bawono Ick Rangga, 2019, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Bactriar Wardi, 1997, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos.
- Data Diolah dari Kantor Des Teluk Tahun 2020 Keterangan: DURK Daftar Usaha Rencana Kerja.
- Departemen Pendidikan Nasional,2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta: Gramedia.
- Departemen Agama RI,2009*Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Penerbit Sabiq.
- Dini Rochdiani, dkk, 2003, *Manajemen Usaha*,Bandung : Gramedia.
- Damsar Dan Indrayani, 2016, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana.
- Fahrudin Adi, 2014, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- <https://www.kbbi.web.id/peran>, diakses pada 20 Februari 2021 Pukul 12:45 WIB.
- Hanif Nurcholis, 2003, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan PemerintahanDesa*.Jakarta: Erlangga.
- Hadi Sutrisno, 1983, *Metodelogi Research*, Jakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hargono, Tahun 2019 Judul: *Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*.
- Indriyani Dan Damsar, 2006, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Kencana.
- Kartasmita,2004, *Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*,Surabaya: DPD Golkar.
- Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko,2019, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Nurliana Tahun 2017, Judul: Pengeolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan FisikDesa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajam Pasar Utara.

Peraturan Menteri Keuangan Prepublik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa Profil Desa Teluk, dicatat Tanggal 08 Juni 2021

Rangka Pengentasan Kemiskinan, (pdf), (Surabaya: Program Studi Manajemen dan Akuntansi, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, 2013), dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/111956-ID-none.pdf> diakses pada hari/tanggal: Senin/24 Februari 2021, pukul: 21.30 WIB

Rincian Anggaran Biaya Tahunan 2020.

Rijal Choirur Tahun 2019 Judul: *Pemerintah Desa Melalui Anggaran Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Jaken Kabupaten Bali*.

Saniyah, *Bendahara Desa Teluk*, Wawancara tanggal 30 Juni 2021.

Supiyen, *warga Desa Teluk*, Wawancara tanggal 30 Juni 2021.

Suharto Edi, 2017, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Pt Refika Aditama.

Sunardjo Unang, 2011, *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.

Sudianto, *Warga Desa Teluk*, Wawancara Tanggal 29 Juni 2021.

Siege dan Marconi, 1987, *Behavioral Accounting South Western Publishing*, Ohio: Cincinnati.

Sujarweni, 2013., *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Sleman: Pustakan Baru Press.

Sumiati, 2015, *Pengalokasian Dana Desa*, (Studi kasus :Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, *Jurnal Katalogis*. Vol,3.pp.135-142.

Sujarweni V. Wiratna, 2019, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Ully Hikmah Andini, dkk. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal*. dalam *Jurnal Administrasti Publik*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Volume 2. Nomor 12: 2010.

Widjaja, 2003, *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Unik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wrihatnolo Randy R dan Dwidjowijoto Riant Nugroho, 2007 *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.

Zubaedi, 2010. *Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Kencana.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Umum

1. Profile Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana sejarah singkat Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana Demografis Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
4. Apa Visi dan Misi Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
5. Bagaimana Struktur Kepengurusan Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
6. Apa saja program pemberdayaan Pemerintah Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat melalui ADD?

B. Pertanyaan Tujuan Penelitian

1. Apa saja upaya peran yang dilakukan Pemerintah Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
2. Apa saja program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
3. Hal apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui ADD?
4. Ada berapa program yang di bentuk oleh Pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat?

5. Berapa lama program ini di laksanakan?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat?
7. Bagaimana cara pemerintah memberikan tahu kepada masyarakat terkait permasalahan tersebut?
8. Apakah Pemerintah Desa Teluk sudah transparansi?
9. Apa saja hambatan yang dihadapi?
10. Apa saja faktor pendukung dalam program ini?

DOKUMENTASI



Wawancara warga



wawancara Warga



Lening parit Dusun Melayu



Kantor Desa Teluk



Rambat Beton di Lubuk Rotan III



Wawancara kepada pemerintahan Desa Teluk



Lening Perit di Balai gajah